

NILAI-NILAI BUDAYA SEKOLAH DI SEKOLAH UMUM

Gilang Jathi Paramita Sari¹

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia¹
Correspondence E-mail: gilang1900031204@webmail.uad.ac.id¹

Sutarman²

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia²
E-mail: sutarman17@pai.uad.ac.id²

Hanafi Nurhuda Avicena³

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia³
E-mail: hanafi1900031223@webmail.uad.ac.id³

Hibban Ahsanal Fata⁴

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia⁴
E-mail: hibban2000031036@webmail.uad.ac.id⁴

Fika Wahyu Nurita⁵

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia⁵
E-mail: fika2000031114@webmail.uad.ac.id⁵

Iffatur Rohmah⁶

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia⁶
E-mail: iffatur2000031128@webmail.uad.ac.id⁶

ABSTRAK

Nilai-nilai budaya di sekolah merupakan dasar penting suatu pendidikan untuk mencetak generasi berkualitas dan berkarakter. Guru mengambil peran penting dalam menentukan nilai budaya di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai budaya sekolah di sekolah umum. Perluasan bahasan mengambil studi perbandingan dari budaya sekolah di Indonesia dan Amerika guna melihat perbedaan-perbedaan nilai. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat beberapa variasi persamaan nilai budaya Indonesia dan Amerika dari sisi karakter guru saat ujian membantu murid memberikan contekan.

Kata Kunci: *Nilai Budaya; Sekolah, dan Guru.*

ABSTRACT

Cultural values in schools are an important basis for education to produce a generation of quality and character. Teachers take an important role in determining cultural values in schools. The purpose of this study was to analyze school cultural values in public schools. The expansion of the discussion takes a comparative study of school culture in Indonesia and America in order to see the differences in values. The findings show that there are several variances in the similarities between Indonesian and American cultural values in terms of the teacher's character when the exam helps students give cheats.

Keywords: *Cultural Values; schools; and teachers.*

A. PENDAHULUAN

Sekolah umum pertama didirikan pada abad ke-17, tujuan sekolah adalah untuk memastikan keluarga mempertahankan nilai-nilai budaya mereka dari tanah asal mereka (Webb, 2006). Ketika pendidikan publik terus berkembang pada pertengahan abad ke-18, tujuan sekolah menjadi “sosialisasi” siswa ke dalam masyarakat (Webb, 2006). Hampir 400 tahun kemudian, sekolah terus “mensosialisasikan” siswa ke dalam budaya dominan koloni pendiri Amerika Serikat, (Carter, 2000). Selama bertahun-tahun banyak kelompok (berdasarkan jenis kelamin, ras, kemampuan, dll.) tidak diberi kesempatan untuk menerima pendidikan (Eva, 2016).

Pendidikan berfungsi tidak hanya untuk menularkan pengetahuan dari guru sebagai pendidik kepada siswa sebagai subjek pembelajaran, tetapi juga untuk menanamkan norma dan nilai moral agar siswa dapat berperilaku sesuai di masyarakat (Vavrus, 2012). Dalam konteks ini, sekolah, perguruan tinggi dan universitas merupakan sektor unggulan yang memainkan peran penting untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan pendidikan dimanapun berada karena banyak keprihatinan dan nilai-nilai praktik pendidikan yang selalu

muncul dan perlu menjadi pertimbangan semua pihak (Cupito et al., 2014).

Selalu menarik untuk ditelaah lebih jauh tentang bagaimana seharusnya lembaga atau lembaga pendidikan pemerintah dan swasta mengukur pencapaian mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tes standar nasional, tes berisiko tinggi, dianggap paling cocok dengan ide ini. Di AS, di bawah Undang-Undang No Child Left Behind (NCLB), pemerintah mewajibkan setiap negara bagian untuk menguji siswa setiap tahun di kelas tiga sampai delapan dalam membaca dan matematika. Membaca dan matematika adalah dua mata pelajaran dalam tujuan NCLB (Howard & Scott, 1981). Dalam hal ini, informasi yang diperoleh dari tes bisa sangat berharga jika tes itu valid dan andal. Hasilnya dapat menunjukkan apa yang telah dipelajari siswa, apa yang belum dipelajari dan di mana mereka perlu ditingkatkan (Ravitch, D, 2010). Andaikan siswa di suatu sekolah mengikuti ujian, setelah nilai diumumkan, maka akan mudah bagi guru sekolah, orang tua dan juga siswa itu sendiri untuk mengidentifikasi kemampuan siswa dalam mata pelajaran yang diujikan. Mereka juga dapat mengidentifikasi pada bagian mana siswa dianggap lemah sehingga kemajuan dapat dilakukan sesuai dengan kemajuan rata-

rata tahunan yang disyaratkan oleh pemerintah (Hunt, 1968).

B. METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka yaitu dengan berbagai penelusuran literatur dan berbagai wawasan serta pembembangan. Penggunaan dalam metode kajian pustaka ini, karena dalam penelitian ini untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu mengenai nilai-nilai budaya di sekolah umum.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dari berbagai literatur serta wawasan dan pengembangan dari berbagai referensi. Analisis data kajian pustaka ini dilakukan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan tema jurnal, lalu peneliti melakukan reduksi data, yaitu mengelompokkan, memilah, dan menghapus beberapa yang tidak diperlukan atau mendukung. Selanjutnya langkah terakhir yaitu menyajikan serta menyimpulkan dari berbagai pengambilan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya Sekolah

Istilah budaya sekolah umumnya mengacu pada keyakinan, persepsi, hubungan, sikap, dan aturan tertulis dan tidak tertulis yang membentuk dan mempengaruhi setiap aspek tentang bagaimana sekolah berfungsi, tetapi istilah tersebut juga mencakup masalah yang lebih konkret seperti keamanan fisik dan emosional siswa, keteraturan ruang kelas dan ruang publik, atau sejauh mana sekolah merangkul dan merayakan keragaman ras, etnis, bahasa, atau budaya (Glossary of Education Reforms, 2013).

Seperti budaya sosial yang lebih besar, budaya sekolah dihasilkan dari perspektif, nilai, interaksi, dan praktik sadar dan tidak sadar, dan sangat dibentuk oleh sejarah institusional khusus sekolah. Siswa, orang tua, guru, administrator, dan anggota staf lainnya semuanya berkontribusi pada budaya sekolah mereka, seperti halnya pengaruh lain seperti komunitas di mana sekolah itu berada, kebijakan yang mengatur cara beroperasinya, atau prinsip-prinsip di mana sekolah itu didirikan.

Secara umum, budaya sekolah dapat dibagi menjadi dua bentuk dasar: budaya positif dan budaya negatif. Banyak peneliti, pendidik, dan penulis telah berusaha untuk mendefinisikan fitur utama dari budaya sekolah yang positif dan negatif, dan banyak studi, artikel, dan buku tersedia tentang topik tersebut. Selain itu, banyak organisasi pendidikan, seperti Pusat Iklim Sekolah Nasional, telah menghasilkan deskripsi rinci tentang budaya sekolah yang positif dan mengembangkan strategi untuk meningkatkannya (mengingat kompleksitas topik, bagaimanapun, tidak mungkin untuk menggambarkan semua perbedaan di sini) (Gay, 1975).

Didefinisikan secara luas, budaya sekolah yang positif kondusif untuk kepuasan profesional, moral, dan efektivitas, serta pembelajaran siswa, pemenuhan, dan kesejahteraan. Daftar berikut adalah pilihan representatif dari beberapa karakteristik yang umumnya diasosiasikan dengan budaya sekolah yang positif (Rogoff, 2003):

1. Keberhasilan individu guru dan siswa diakui dan dirayakan.

2. Hubungan dan interaksi ditandai dengan keterbukaan, kepercayaan, rasa hormat, dan penghargaan.
3. Hubungan staf bersifat kolegial, kolaboratif, dan produktif, dan semua anggota staf menjunjung standar profesional yang tinggi.
4. Siswa dan anggota staf merasa aman secara emosional dan fisik, dan kebijakan serta fasilitas sekolah mempromosikan keselamatan siswa.
5. Pemimpin sekolah, guru, dan anggota staf mencontohkan perilaku positif dan sehat bagi siswa.
6. Kesalahan tidak dihukum sebagai kegagalan, tetapi itu dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh baik bagi siswa maupun pendidik.
7. Siswa secara konsisten memegang harapan akademik yang tinggi, dan mayoritas siswa memenuhi atau melampaui harapan tersebut.
8. Keputusan kepemimpinan yang penting dibuat secara kolaboratif dengan masukan dari anggota staf, siswa, dan orang tua.
9. Kritik, ketika disuarakan, bersifat konstruktif dan bermaksud baik, bukan antagonis atau mementingkan diri sendiri.
10. Sumber daya pendidikan dan kesempatan belajar didistribusikan secara adil, dan semua siswa, termasuk minoritas dan siswa penyandang disabilitas.
11. Semua siswa memiliki akses ke dukungan akademik dan layanan yang mereka butuhkan untuk berhasil.
12. Pembaruan

Budaya sekolah telah menjadi konsep sentral dalam banyak upaya untuk mengubah cara sekolah beroperasi dan meningkatkan hasil pendidikan. Sementara budaya sekolah

sangat dipengaruhi oleh sejarah kelembagaannya, budaya juga membentuk pola, kebiasaan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku masa depan, yang dapat menjadi hambatan untuk reformasi dan perbaikan. Misalnya, jika budaya fakultas umumnya tidak berfungsi—yaitu, jika ketegangan antarpribadi dan ketidakpercayaan sering terjadi, masalah jarang ditangani atau diselesaikan, atau anggota staf cenderung lebih banyak berdebat daripada berkolaborasi atau terlibat dalam diskusi profesional yang produktif—kemungkinan hal ini faktor budaya akan secara signifikan memperumit atau menghalangi setiap upaya untuk mengubah cara sekolah beroperasi. Contoh sederhana ini menggambarkan mengapa budaya sekolah telah menjadi objek dari begitu banyak studi penelitian dan upaya reformasi—tanpa budaya sekolah yang kondusif untuk perbaikan, reformasi menjadi lebih sulit secara eksponensial (Hollins, 2015).

Berikut ini menjelaskan beberapa contoh representatif dari cara-cara umum yang mungkin dilakukan sekolah untuk meningkatkan budaya mereka (Tyler et al., 2006a):

1. Membangun komunitas belajar profesional yang mendorong guru untuk berkomunikasi, berbagi keahlian, dan bekerja sama secara lebih kolegial dan produktif.
2. Memberikan presentasi, seminar, dan pengalaman belajar yang dirancang untuk mendidik staf dan siswa tentang intimidasi dan mengurangi kasus intimidasi.
3. Menciptakan acara dan pengalaman pendidikan yang menghormati dan merayakan keragaman ras, etnis, dan

bahasa dari badan siswa, seperti mengadakan acara dan festival budaya, memamerkan materi yang relevan secara budaya di seluruh sekolah, mengundang pemimpin budaya lokal untuk mempresentasikan kepada siswa, atau membuat pernyataan eksplisit hubungan antara beragam latar belakang budaya siswa dan apa yang diajarkan dalam sejarah, studi sosial, dan kursus sastra. Untuk diskusi terkait, lihat pendidikan dan suara multikultural.

4. Menetapkan program penasehat yang memasang kelompok siswa dengan penasihat orang dewasa untuk memperkuat hubungan orang dewasa-siswa dan memastikan bahwa siswa dikenal baik dan didukung oleh setidaknya satu orang dewasa di sekolah.
 5. Mensurvei siswa, orang tua, dan guru tentang pengalaman mereka di sekolah, dan mengadakan forum komunitas yang mengundang peserta untuk berbagi pendapat tentang dan rekomendasi untuk sekolah dan programnya.
 6. Menciptakan tim kepemimpinan yang terdiri dari perwakilan lintas bagian dari administrator sekolah, guru, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat yang mengawasi dan memimpin inisiatif perbaikan sekolah.
2. Perdebatan

Karena sebagian besar anggota komunitas sekolah akan mendapat manfaat dari budaya yang lebih positif, dan faktor budaya cenderung berkontribusi secara signifikan terhadap keadaan emosional seperti kebahagiaan dan ketidakbahagiaan atau kepuasan dan ketidakpuasan, konsep budaya sekolah yang lebih positif jarang

kontroversial. Untuk alasan ini, perdebatan cenderung muncul (jika memang muncul) sebagai tanggapan terhadap proposal reformasi tertentu, daripada tujuan umum untuk meningkatkan budaya sekolah. Namun mengingat bahwa disfungsi organisasi pada dasarnya adalah pola perilaku, sikap, dan keyakinan yang seringkali tidak disadari yang cenderung menghalangi perubahan dan peningkatan organisasi—dan karena manusia dapat menjadi sangat terikat pada emosi dan perilaku yang mungkin membuat mereka kurang bahagia, terpenuhi, produktif, atau berhasil—usaha untuk mereformasi budaya sekolah mungkin lebih mungkin menghadapi penolakan, kritik, atau kontroversi di sekolah yang paling membutuhkan reformasi budaya (Tomasello, 2000). Dalam beberapa tahun terakhir, masalah yang berkaitan dengan budaya sekolah disebut-sebut sebagai alasan mengapa sekolah harus ditutup atau mengapa sebagian besar staf pengajar harus dipecat. Dalam kasus ini, "budaya sekolah" dapat menjadi titik nyala dalam perdebatan yang lebih besar tentang kebijakan dan strategi reformasi sekolah tertentu (Deutsch, 1963).

Karena semua budaya sekolah adalah unik, penting untuk menyelidiki dan mengembangkan pemahaman tentang penyebab yang mendasari setiap perdebatan, termasuk kondisi budaya yang sudah ada sebelumnya yang mungkin berkontribusi pada perdebatan tersebut. Untuk mengadaptasi kalimat pembuka terkenal Tolstoy di *Anna Karenina*: Semua budaya sekolah yang positif memiliki ciri-ciri yang sama, tetapi setiap budaya sekolah yang negatif adalah negatif dengan caranya sendiri (Johnson, 1982).

3. Nilai Budaya dalam Konteks Pendidikan di Indonesia dan Amerika Serikat

Berkaitan dengan ujian, Spring (2008) juga menyatakan bahwa bagi siswa, tes berisiko tinggi dapat menentukan kenaikan kelas atau kelulusan, dan bagi guru dan administrator sekolah, hasil nilai tes siswa dapat digunakan untuk mengukur kinerja mereka atau menentukan gaji mereka meningkat (Spring, 1994). Ini menyiratkan betapa pentingnya tes yang tidak hanya mempengaruhi siswa tetapi juga keberadaan sekolah. Nilai yang meningkat dan memuaskan yang diperoleh siswa pada ujian berisiko tinggi akan sangat menentukan kenaikan pangkat dan kelulusan siswa. Selain itu, skor juga mempengaruhi pandangan dan stigma masyarakat terhadap sekolah khususnya kualitas akademik, yang erat kaitannya dengan pilihan orang tua dalam menyekolahkan anaknya, serta bonus yang diperoleh guru, pengelola dan kepala sekolah dari pemerintah (Apple, 2018).

Di Indonesia, ujian pemerintah yang dikenal dengan Ujian Nasional (UN – sebelumnya bernama Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional/Ebtanas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas) menjadi bagian dari sistem pendidikan sekolah yang selalu memberikan banyak tekanan kepada sekolah dan masyarakatnya. Depdiknas memberikan siswa ujian nasional satu kali di kelas 6, 9 dan 12 untuk mengukur prestasi mereka dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Apakah seorang siswa dinyatakan lulus dari sekolah atau tidak, sebagian besar akan bergantung pada hasil tes. Meski pro dan kontra selalu mewarnai kebijakan nasional yang masing-masing pihak memperdebatkan

signifikansi dan dampaknya, pemerintah tetap melakukan uji coba terhadap targetnya. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi sekolah untuk bekerja keras meningkatkan kualitas akademiknya agar nilai siswanya memenuhi standar minimal yang berlaku dan mendapat kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

Mengingat pengaruh signifikan dari tes berisiko tinggi di AS, beberapa kecurangan dalam pelaksanaan tes muncul. W. James Popham, seorang profesor emeritus di Sekolah Pascasarjana Pendidikan di UCLA (Spring, 2008) mengidentifikasi beberapa bentuk kecurangan di AS dalam ujian, yaitu administrator sekolah menghapus tanggapan yang salah pada jawaban siswa dan mengganti jawaban yang benar, guru mengizinkan lebih banyak waktu daripada tes yang dibutuhkan instruksi, guru memberi siswa petunjuk tentang jawaban mana yang benar, dan sesi persiapan tes menggunakan item tes yang sebenarnya. Mengingat pentingnya nilai ujian, maka tidak heran jika para guru dan pejabat sekolah telah menyusun berbagai cara untuk mempermainkan sistem ujian yaitu dengan melakukan trik dan jalan pintas untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tanpa meningkatkan pendidikan (Ravitch, 2010). Hal ini tentu saja menggelikan karena apa yang diharapkan sekolah tidak sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Apa yang mereka yakini sebagai jalan pintas untuk mendapatkan nilai tinggi akan menghancurkan nilai-nilai pendidikan sekolah yang mengedepankan norma akuntabilitas dan kejujuran yang tinggi. Jika hal ini terus terjadi, nilai-nilai luhur pendidikan dapat menurun dari waktu ke waktu yang merusak fungsi pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan

mengarahkan manusia untuk berperilaku sesuai (Ogbu, 1982).

Sama halnya di AS, kasus mencontek juga terjadi di Indonesia. Di setiap organisasi PBB, kecurangan selalu dilaporkan dalam berbagai bentuk selain yang ditemukan di AS. Mendelegasikan siswa yang pandai di kelas untuk membagikan jawabannya kepada semua temannya dalam ujian adalah hal yang biasa terjadi. Bahwa seorang guru memberi murid-muridnya catatan kecil dari jawaban tes juga merupakan metode lain yang terjadi. Semua bertujuan untuk membantu siswa mendapatkan nilai bagus dalam ujian yang secara signifikan akan mempengaruhi status sekolah di mata publik dan pandangan pemerintah. Pertanyaannya sekarang mengapa kecurangan sering terjadi baik di Indonesia maupun di AS? Isu ini telah muncul terhadap praktik pendidikan di seluruh dunia. Tingginya pengaruh hasil tes terhadap status sekolah, pandangan masyarakat terhadap sekolah, pilihan orang tua terhadap pendidikan anaknya, bonus guru, dukungan dana sekolah dari pemerintah, dan organisasi ujian yang kurang diperhatikan tampaknya menjadi hal-hal yang mendorong sering terjadi kecurangan. Kesadaran moral dalam menyeimbangkan tuntutan untuk memperoleh peningkatan nilai dalam ujian harus ditekankan dan ditanamkan kepada siswa dan pejabat sekolah, di samping pengaturan yang ketat dalam penyelenggaraan ujian dan sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran.

Pilihan orang tua dalam menyekolahkan anaknya ke sekolah merupakan hal menarik lainnya untuk dibahas. Sebagian besar, orang tua akan menganggap status sekolah (swasta atau negeri), biaya kuliah, kualitas akademik, dan nilai-nilai agama yang diajarkan di

sekolah sebagai pertimbangan dasar mereka. Di Indonesia, sekolah umum sangat disukai oleh sebagian besar orang tua untuk beberapa hal. Dalam studinya di Malang, Bjork (2005) menyatakan bahwa perguruan tinggi swasta cenderung menjadi pilihan cadangan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pilihannya. Hal ini berlaku saat ini karena sekolah negeri lebih murah daripada sekolah swasta dan menawarkan kualitas akademik yang lebih baik secara umum. Meskipun beberapa sekolah swasta elit memiliki keunggulan akademik yang tinggi, terutama yang terkait dengan yayasan keagamaan, mereka mengenakan biaya kuliah yang mungkin tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya (Tyler et al., 2006b). Dengan demikian, hanya orang tua yang mampu secara ekonomi yang boleh menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

Demikian pula, orang tua AS juga akan mempertimbangkan kualitas akademik, terutama nilai ujian dari tes berisiko tinggi dalam mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Apakah sekolah negeri atau swasta, menurut saya, bukan masalah bagi orang tua dengan pendapatan tinggi. Bahkan, selama bertahun-tahun, banyak orang Amerika berpikir bahwa sekolah swasta umumnya lebih unggul daripada sekolah negeri dan keunggulan ini ditegaskan oleh penelitian yang menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari siswa yang bersekolah di sekolah negeri (Berliner, 1995). Meskipun beberapa alasan dari studi seperti sekolah swasta dapat memilih siswa yang mereka daftarkan dan keluarkan, dan fokus serta upaya mereka pada mata pelajaran inti menjawab keingintahuan publik, tetapi banyak yang masih percaya bahwa sekolah swasta lebih baik daripada

negeri. Sepengetahuan saya, inilah tren pendidikan yang menarik saat ini yang terjadi tidak hanya di AS tetapi juga di Indonesia (Sampson, 1977). Apa yang dicari publik adalah keunggulan akademik yang ditawarkan sekolah kepada anak-anak mereka. Uang sekolah tidak akan menjadi masalah besar bagi orang tua selama sekolah dapat memenuhi dan memenuhi tuntutan mereka. Orang tua, terutama mereka yang berpendidikan, kebanyakan akan mencari sekolah berkualitas tinggi yang dapat menjamin pendidikan yang sangat baik bagi anak-anak mereka, tidak peduli seberapa tinggi biaya sekolah. Sekolah swasta, yang elit, seolah menjawab tuntutan orang tua di masa sekarang dan mendatang.

Guru adalah subjek untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Banyak yang beranggapan bahwa guru yang profesional akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa dalam hal keunggulan pendidikan. Sejak dulu hingga sekarang, pembuat kebijakan dan pendidik guru konsisten dengan rumusan bahwa mengajar membutuhkan keterampilan dasar, pengetahuan konten, dan keterampilan pedagogis umum (Shulman, 1987). Ini menyiratkan bahwa guru sebagai profesi tidak hanya membutuhkan keterampilan kognitif tetapi juga pedagogis yang berhubungan dengan cara mengajar dan sikap mengajar. Guru harus menjadi panutan bagi siswa. Pepatah Jawa populer “Guru: Digugu lan Ditiru /Guru: dipercaya dan diteladani” menuntun pada pemahaman bahwa tindakan apa pun yang dilakukan guru akan menjadi pertimbangan siswa. Oleh karena itu, menjadi seorang guru sangat membutuhkan tenaga yang berkualitas baik dari segi kognitif, pedagogik maupun interpersonal.

Sayangnya, berkaitan dengan nilai profesionalisme, banyak guru Indonesia pada umumnya masih menunjukkan beberapa tindakan tidak profesional dalam kesehariannya. Dari diskusi kelas, kami belajar bahwa datang terlambat untuk mengajar, mengakhiri kelas lebih awal dari jadwal, membicarakan hal-hal yang tidak penting di kantor pada waktu senggang, kurang perhatian dalam menandai dan mengembalikan lembar kerja siswa adalah beberapa contoh yang terjadi pada guru Indonesia pada umumnya. Kebiasaan seperti itu tampaknya membatu di dalamnya yang membuat mereka sulit untuk dilepaskan. Selain itu, sistem penilaian kinerja atas dasar loyalitas, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama dan inisiatif cenderung menyesatkan dalam penilaian guru. Ini berlaku untuk semua PNS Indonesia termasuk sebagian besar guru. Singkatnya, budaya pegawai negeri sipil Indonesia mempromosikan nilai-nilai dan perilaku yang secara fundamental bertentangan dengan peran baru guru yang saat ini sedang dipromosikan oleh pemerintah (Bjork, 2005). Hal ini berbeda dengan guru-guru Amerika pada umumnya yang menunjukkan disiplin tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Dari diskusi kelas, kita tahu bahwa banyak guru Amerika akan datang lebih awal ke kelas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan kelas. Mereka akan memulai dan menyelesaikan kelas tepat seperti yang dijadwalkan. Mereka juga menghabiskan waktu luangnya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan guru lain seperti menilai dan mengoreksi daripada mengobrol dengan teman di kantor (Franklin & Fulani, 1974).

D. KESIMPULAN

Nilai-nilai pendidikan baik di Indonesia maupun AS terkait dengan akuntabilitas, pilihan orang tua dan profesional guru merupakan tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah dan masyarakat untuk pendidikan yang lebih baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. (2018). Ideology and Curriculum. In *Ideology and Curriculum*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429400384>
- Cupito, A. M., Stein, G. L., & Gonzalez, L. M. (2014). Familial Cultural Values, Depressive Symptoms, School Belonging and Grades in Latino Adolescents: Does Gender Matter? *Journal of Child and Family Studies* 2014 24:6, 24(6), 1638–1649. <https://doi.org/10.1007/S10826-014-9967-7>
- Deutsch, M. (1963). The Disadvantaged Child and the Learning Process. *Equity & Excellence in Education*, 1(1), 11–12. <https://doi.org/10.1080/0020486630010102>
- Eva, M. (2016). Pengembangan Budaya Sekolah. *Tarbawi*, 2(02), 86–96. <https://media.neliti.com/media/publications/publications/256481-pengembangan-budaya-sekolah-1bf3dd81.pdf>
- Franklin, A. J., & Fulani, L. (1974). Cultural content of materials and ethnic group performance in categorized recall. *The Empirical Research Conference of Black Psychologists*, 368–379.
- Gay, G. (1975). Cultural differences important in the education of Black children. *Momentum*, 2, 30–33.
- Glossary of Education Reforms. (2013). *School Culture Definition*. <https://www.edglossary.org/school-culture/>
- Hollins, E. R. (2015). Culture in School Learning: Revealing the Deep Meaning: Third Edition. In *Culture in School Learning: Revealing the Deep Meaning: Third Edition*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781315813615>
- Howard, A., & Scott, R. (1981). The study of minority groups in complex society. In *Handbook of cross-cultural human development* (pp. 115–154). Garland.
- Hunt, J. M. (1968). *The psychological basis for preschool cultural enrichment programs*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Johnson, N. B. (1982). The material culture of public school classrooms: The symbolic integration of local schools and national culture. *Anthropology and Education Quarterly*, 11(3), 173–190. <https://doi.org/10.1525/aeq.1980.11.3.05x1867u>
- Ogbu, J. U. (1982). Cultural discontinuities and schooling. *Anthropology and Education Quarterly*, 13(4), 291–307. <https://doi.org/10.1525/aeq.1982.13.4.0>

- Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. *Choice Reviews Online*, 41(02), 41-1244-41-1244. <https://doi.org/10.5860/choice.41-1244>
- Sampson, E. E. (1977). Psychology and the American ideal. *Personality and Social Psychology*, 35(11), 767-782. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.35.11.767>
- Spring, J. (1994). *The American school: 1642-1993*. McGraw-Hill.
- Tomasello, M. (2000). Culture and cognitive development. *Current Directions in Psychological Science*, 9(2), 37-40. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00056>
- Tyler, K. M., Boykin, A. W., Miller, O., & Hurley, E. (2006a). Cultural values in the home and school experiences of low-income African-American students. *Social Psychology of Education*, 9(4), 363-380. <https://doi.org/10.1007/s11218-006-9003-x>
- Tyler, K. M., Boykin, A. W., Miller, O., & Hurley, E. (2006b). Cultural values in the home and school experiences of low-income African-American students. *Social Psychology of Education 2006* 9:4, 9(4), 363-380. <https://doi.org/10.1007/S11218-006-9003-X>
- Vavrus, M. (2012). Culturally Responsive Teaching. In *21st Century Education: A Reference Handbook* (pp. II-49-II-57).